

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN DALAM
PENERBITAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG RUMAH
IBADAH**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Hukum



Diajukan oleh:

WILHELMUS BIMO PRIMASTOPO

NIM: 22.C1.0103

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2026

ABSTRACT

The issues raised in this study are the responsibilities of the Karimun Regency Government, which are divided into regulations governing the implementation of PBG for houses of worship in Karimun Regency, the responsibilities of the Karimun Regency Government in administering PBG permits for houses of worship, and the process of applying for PBG for houses of worship.

This study use a qualitative research method with a statute approach through the analysis of regulations used and a sociological approach through interviews.

The results show that the Karimun Regency Government uses regulations from the Central Government and forms Regional Regulations in the implementation of PBG for houses of worship. The Karimun Regency Government's responsibilities are divided into three main parts in the implementation of PBG for houses of worship, namely socialization, conflict resolution, and enforcement of sanctions. The process of issuing PBG for house of worship in Karimun Regency is submitted and specified Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).

Keywords: *PBG, Government Responsibility, Houses of Worship, Karimun Regency*

ABSTRAK

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Karimun yang dibagi menjadi peraturan yang mengatur pelaksanaan PBG rumah ibadah di Kabupaten Karimun, tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Karimun dalam menyelenggarakan perizinan PBG rumah ibadah, dan proses permohonan PBG rumah ibadah di Kabupaten Karimun.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) melalui analisis peraturan yang digunakan dan pendekatan sosiologis melalui wawancara.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Karimun menggunakan Peraturan dari Pemerintah Pusat dan membentuk Peraturan Daerah dalam penyelenggaraan PBG rumah ibadah. Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Karimun dibagi menjadi tiga bagian besar dalam pelaksanaan PBG rumah ibadah yaitu sosialisasi, penyelesaian konflik, dan penegakan sanksi. Proses penerbitan PBG rumah ibadah di Kabupaten Karimun diajukan dan tertuang secara spesifik di Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).

Kata Kunci : *PBG, Tanggung Jawab Pemerintah, Rumah Ibadah, Kabupaten Karimun.*